



Analisis Peran Kelompok Tani Hutan Konservasi dalam Rehabilitasi Ekosistem di Zona Rehabilitasi Resort Lawe Mamas, Taman Nasional Gunung Leuser

(Analysis of the Role of Conservation Forest Farmer Groups in Ecosystem Rehabilitation in the Lawe Mamas Resort Rehabilitation Zone, Gunung Leuser National Park)

Sabaruddin¹, Halus Satriawan², Sitti Zubaidah³

¹Mahasiswa Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Universitas Almuslim, Jl. Almuslim Matangglumpangdua, Peusangan, Bireuen, 24261, Indonesia.

^{2,3}Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Universitas Almuslim, Jl. Almuslim Matangglumpangdua, Peusangan, Bireuen, 24261, Indonesia.
Email: halussatriawan@umuslim.ac.id

Diterima: 11 Agustus 2025, Direvisi: 02 Oktober 2025, Disetujui: 22 Desember 2025
DOI: 10.31849/n77qb738

Abstract

This study aims to analyse the level of effectiveness and contribution of the Conservation Forest Farmers Group (KTHK) as a management partner in supporting ecosystem rehabilitation in the Lawe Mamas Resort Rehabilitation Zone, Gunung Leuser National Park (TNGL). The study used a mixed methods approach with a qualitative approach reinforced by descriptive quantitative analysis through tabulation of KTHK role scores. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and questionnaires from 41 informants consisting of government representatives, NGOs, community leaders, and KTHK chairpersons and members. The results of the study show that the educational role has the highest score (2.9), indicating a high level of effectiveness in providing information and raising awareness of conservation, while the economic and social roles are the lowest (2.1) due to limited market access and production facilities. In general, the institutional, participatory, and supervisory roles show fairly strong results with scores between 2.4 and 2.8. These findings confirm that the existence of KTHK contributes significantly to the sustainability of forest area rehabilitation, but requires institutional strengthening and economic support for more sustainable community participation. The practical implications of this study emphasise the importance of strengthening the institutional capacity of KTHK and developing a non-timber forest product-based economy as a strategy for empowering communities around TNGL.

Keywords: forest conservation, conservation forest farmers group, community empowerment, ecosystem rehabilitation.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas dan kontribusi peran Kelompok Tani Hutan Konservasi (KTHK) sebagai mitra pengelola dalam mendukung rehabilitasi ekosistem di Zona Rehabilitasi Resort Lawe Mamas, Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Penelitian menggunakan metode mixed methods dengan pendekatan kualitatif yang diperkuat oleh analisis kuantitatif deskriptif melalui tabulasi skor peran KTHK. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan kuesioner terhadap 41 narasumber yang terdiri dari perwakilan pemerintah, LSM, tokoh masyarakat, serta ketua dan anggota KTHK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran edukasi memiliki skor tertinggi (2,9) yang



menunjukkan tingkat efektivitas tinggi dalam penyuluhan dan peningkatan kesadaran konservasi, sedangkan peran ekonomi dan sosial merupakan yang terendah (2,1) karena keterbatasan akses pasar dan sarana produksi. Secara umum, peran kelembagaan, partisipasi, dan pengawasan menunjukkan hasil cukup kuat dengan nilai antara 2,4–2,8. Temuan ini menegaskan bahwa keberadaan KTHK berkontribusi signifikan terhadap keberlanjutan rehabilitasi kawasan hutan, namun memerlukan penguatan kelembagaan dan dukungan ekonomi agar partisipasi masyarakat lebih berkelanjutan. Implikasi praktis penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan KTHK dan pengembangan ekonomi berbasis hasil hutan bukan kayu sebagai strategi pemberdayaan masyarakat sekitar TNGL.

Kata kunci : konservasi hutan, kelompok tani hutan konservasi, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi ekosistem.



I. PENDAHULUAN

Pemerintah saat ini sedang giat melaksanakan berbagai langkah untuk mengatasi ancaman kerusakan lingkungan yang kian memburuk, termasuk kerusakan terhadap sumber daya hutan. Salah satu strategi yang diterapkan adalah melalui penetapan dan pengelolaan kawasan hutan sebagai area konservasi (KLHK, 2024). Mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan hutan dengan fungsi pokok konservasi diartikan sebagai hutan yang memiliki karakteristik khusus dan berfungsi utama untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati, baik tumbuhan, satwa, maupun ekosistemnya. Karena memiliki fungsi utama dalam pelestarian tersebut, kawasan konservasi menjadi wilayah yang sangat penting untuk dijaga keberlangsungannya (Müller & Fourie, 2011). Upaya pelestarian kawasan ini perlu terus dilakukan, karena wilayah ini berperan sebagai penyangga kehidupan, pelindung keanekaragaman hayati berupa flora dan fauna, serta sebagai sarana untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dalam pengelolaannya di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) sering muncul permasalahan perambahan, *illegal logging*, perburuan satwa, klaim lahan dan berbagai bencana, seperti banjir dan longsor, merupakan permasalahan yang dihadapi hampir setiap waktu dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser pada rentang waktu 20 tahun terakhir ini (Suhendi & Ariantiningasih, 2013). Jika dihubungkan dengan kondisi pengelolaan hutan secara nasional, Indonesia mencatat angka kehilangan hutan primer tertinggi ketiga di dunia pada tahun 2019

berdasarkan data dari WRI (Global Forest Watch). Menurut data resmi, deforestasi pada tahun 2018 tercatat sebanyak 440.000 ha, lebih rendah dibanding 480.000 ha pada tahun sebelumnya (WRI, 2019). Perambahan dan budidaya dengan tanaman perkebunan mendominasi persoalan masyarakat dengan pihak pemangku kebijakan. Masyarakat di sekitar wilayah TNGL, khususnya di Kabupaten Aceh Tenggara seringkali melakukan tindakan yang mengakibatkan kerusakan hutan terutama di kawasan konservasi dengan motif tekanan ekonomi (Mongabay, 2019).

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pelestarian kawasan konservasi TNGL bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak pengelola, tetapi juga merupakan kewajiban bersama seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Oleh karena itu, keberhasilan pelestarian kawasan TNGL, termasuk perlindungan terhadap populasi satwa liar dan habitatnya, sangat bergantung pada partisipasi, kontribusi, dan komitmen dari berbagai pihak, seperti pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, LSM, akademisi, serta masyarakat. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara sendiri telah mengeluarkan kebijakan pengawasan dalam pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser, dengan melibatkan peran aktif kelompok tani hutan konservasi yang tercantum dalam Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2013 tentang RTRW 2013–2033 yang mensyaratkan fungsi ruang lindung dan budidaya, serta menjadikan kawasan lindung sebagai bagian dari struktur ruang.

Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL)



merupakan kawasan konservasi dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, antara lain tercatat sebagai habitat bagi kurang lebih 129 spesies mamalia, ± 380 spesies burung, serta spesies-endemi dan terancam seperti Orangutan Sumatera (*Pongo abelii*), Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) dan Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*) (Kuswanda & Barus, 2017). Salah satu tantangan pengelolaan TNGL adalah kerusakan hutan akibat perambahan, pembalakan liar, dan alih fungsi lahan, yang sebagian besar dipicu oleh tekanan ekonomi masyarakat sekitar (Adela & Saragih, 2017).

Resort Lawe Mamas, sebagai bagian dari wilayah kerja Balai Besar TNGL, memiliki zona rehabilitasi yang berfungsi untuk memulihkan ekosistem hutan yang rusak agar kembali ke kondisi optimalnya. Oleh karena itu untuk mencapai pengelolaan hutan yang berkelanjutan, partisipasi masyarakat sebagai aktor utama sangat diapresiasi, karena keterlibatan mereka berperan penting dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan (Daulay et al., 2023). Partisipasi petani rehabilitasi terlihat dalam pelaksanaan program rehabilitasi lahan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, dengan tujuan mengembalikan fungsi hutan serta menjaga kelestariannya. Program rehabilitasi hutan ini mencakup kegiatan pemulihan ekosistem dan pengamanan kawasan. Selain itu, petani ikut berpartisipasi karena program ini juga bertujuan mengembangkan kapasitas masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan mereka. Pengelola kawasan bekerja sama dengan masyarakat sekitar melalui program kemitraan

konservasi yang meliputi upaya pemulihan ekosistem dan pemberdayaan masyarakat dengan membentuk Kelompok Tani Hutan Konservasi (KTHK) (Surbakti, 2023).

Pada zona Rehabilitasi Resort Lawe Mamas, TNGL, terdapat tiga KTHK yang menjadi objek penelitian, yaitu KTHK Lestari dengan luas area garapan 78 hektar, KTHK Lestari Lawe Meruntuh seluas 120 hektar, dan KTHK Lestari Lawe Deski dengan luas 117,5 hektar. Program kemitraan ini berlaku selama lima tahun sekali sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) yang dibuat antara anggota KTHK dan pihak pengelola. Berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh anggota KTHK di zona rehabilitasi Resort Lawe Mamas mencakup pemulihan ekosistem melalui pembibitan, penanaman, pemeliharaan, serta pengembangan kapasitas masyarakat. Untuk mencapai keberhasilan rehabilitasi, pengelola kawasan bekerja sama dengan masyarakat melalui program kemitraan konservasi, salah satunya dengan membentuk KTHK, yang berperan dalam pemulihan ekosistem, penanaman kembali, pengamanan kawasan, serta pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis sumber daya hutan lestari. Partisipasi aktif masyarakat dalam program ini tidak hanya membantu mempercepat proses rehabilitasi hutan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi. Namun, sejauh mana peran KTHK dalam mendukung keberhasilan program rehabilitasi di zona ini perlu dianalisis secara komprehensif, sehingga dapat menjadi dasar perbaikan strategi pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat ke depan.



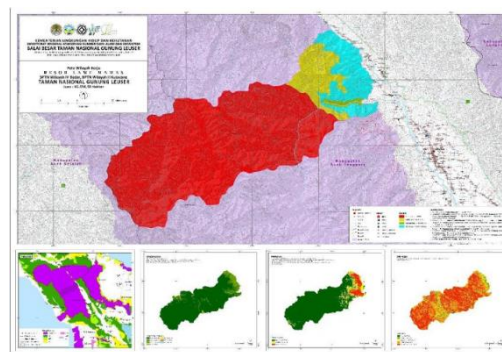
Meskipun sejumlah penelitian sebelumnya, seperti Surbakti (2023), telah membahas kinerja KTHK dalam rehabilitasi hutan di Resort Sekoci, Kabupaten Langkat, fokus penelitian tersebut masih terbatas pada aspek administratif dan pelaksanaan tugas kelembagaan. Penilaian kinerja yang digunakan bersifat deskriptif tanpa menelaah efektivitas peran sosial, kelembagaan, edukatif, dan ekonomi KTHK dalam mendukung keberhasilan konservasi. Selain itu, penelitian sebelumnya belum mengintegrasikan pendekatan analisis kualitatif dan kuantitatif yang memungkinkan pengukuran tingkat efektivitas peran KTHK secara lebih komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara mendalam lima dimensi peran KTHK, yaitu kelembagaan, edukasi, partisipasi, pengawasan, dan ekonomi-sosial—dalam mendukung rehabilitasi ekosistem di Zona Rehabilitasi Resort Lawe Mamas, Taman Nasional Gunung Leuser.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dan tujuan penelitian ini adalah Rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana tingkat efektivitas peran kelembagaan, edukasi, partisipasi, pengawasan, dan ekonomi-sosial KTHK dalam mendukung rehabilitasi ekosistem di Zona Rehabilitasi Resort Lawe Mamas, TNGL?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data sekunder terkait peran KTHK di Zona Rehabilitasi Resort Lawe Mamas (Gambar 1). Objek dalam penelitian ini adalah KTHK Lestari, KTHK Lestari Lawe Meruntuh

dan KTHK Lestari Lawe Desky. Ruang lingkup penelitian ini adalah Partisipasi Kelompok Tani Hutan Konservasi (KTHK) di Zona Rehabilitasi Resort Lawe Mamas Desa Tanjung Gabungan Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara. Pendekatan yang digunakan adalah metode campuran (*mixed methods*), di mana data kualitatif berfungsi sebagai dasar utama dengan dukungan data kuantitatif melalui tabulasi skor.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

2.1. Jenis Dan Pengumpulan Data

2.1.1. Data Primer

Data primer merupakan data asli yang diperoleh langsung oleh peneliti di lokasi penelitian melalui proses pengamatan (*observasi*) atau wawancara dengan narasumber yang relevan. Data ini belum pernah diolah sebelumnya oleh pihak lain sehingga memiliki tingkat kemurnian yang tinggi untuk menjawab tujuan penelitian (Sugiyono, 2017). Data primer dikumpulkan untuk mendukung penelitian dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Data untuk penelitian kualitatif diperoleh dengan instrumen wawancara mendalam (*in depth interview*) terhadap beberapa narasumber



tertentu dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Sementara itu, untuk penelitian kuantitatif, data primer diperoleh dengan menyebarkan kuisioner secara acak kepada masyarakat lokal. Pertanyaan yang diajukan seputar aktivitas dan keterlibatan masyarakat dalam upaya konservasi serta perspektif masyarakat terhadap program konservasi yang sedang berjalan.

2.1.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Data sekunder dipergunakan baik dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif (Sugiyono, 2017). Data diperoleh biasanya dengan studi pustaka dari jurnal, buku, laporan, dan dokumen yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam konservasi di lokasi penelitian yang diperoleh dari badan yang berwenang seperti Balai Taman Nasional Wilayah IV Badar, masyarakat lokal, ketua dan anggota Kthk Lestari, Kthk Lestari Lawe Desky, Kthk Lestari Lawe Meruntuh, Kantor Pemerintahan, dan NGO.

2.2. Pengumpulan Data

2.2.1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk menunjang analisis perbandingan atas dua lokasi penelitian dengan teknik wawancara, pengamatan langsung, dan dokumentasi;

1) Wawancara semi terstruktur

Dalam penelitian ini adalah stakeholder terkait sejauh mana tahapan inovasi sosial dapat

terjadi dengan memahami perubahan sumber pendapatan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta praktik tata kelola di tingkat lokal. Dalam pelaksanaan metode pengambilan data wawancara, peneliti melakukan wawancara tatap muka dengan partisipan, dengan metode wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara menggunakan daftar pertanyaan, namun sifatnya lebih fleksibel karena berusaha menyesuaikan dengan isu yang diangkat oleh narasumber (Creswell, 2014). penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan teknik purposive. Purposive Sampling merupakan teknik perolehan data dengan sistem penentuan dengan menggunakan berbagai metode pemilihan untuk menemukan kemungkinan kasus dan narasumber dengan kriteria tertentu (Moleong, 2017). Teknik purposive dilakukan dengan tahap awal yaitu menentukan narasumber yaitu stakeholders kunci yang memberikan informasi mengenai keterlibatan masyarakat terhadap upaya konservasi hutan di kawasan.

2) Pengamatan Langsung

Pengamatan atau observasi dilakukan tanpa partisipasi terhadap aktivitas masyarakat yang berhubungan dengan keterlibatan masyarakat dalam program konservasi. Pengamatan dilakukan terhadap aktivitas masyarakat sehari-hari pada umumnya. Pengamatan langsung dapat mendukung penemuan-penemuan aspek-aspek baru selama pengamatan yang tidak diperoleh dengan studi pustaka atau dari dokumen yang telah ada (Creswell, 2014).

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik



pengumpulan data untuk memperoleh gambaran umum lokasi dan aktivitas masyarakat terhadap kawasan. Dokumentasi dapat berupa pengambilan foto, pencatatan seperti jurnal pribadi atau notulen rapat. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif, dimana hasil penelitian ini dideskripsikan secara jelas dan terperinci dengan memberikan gambaran secara komprehensif tentang partisipasi masyarakat pada program kemitraan konservasi, khususnya mengenai bentuk partisipasi masyarakat dan aspek aspek yang berhubungan dengan partisipasi tersebut.

2.2.2. Teknik Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan teknik purposive sample di mana pemilihan narasumber dilakukan dengan pertimbangan bahwa narasumber memiliki relevansi dengan informasi yang berkaitan dengan aktivitas dan partisipasi masyarakat atas konservasi hutan. Responden wawancara ditetapkan 41 narasumber dari kelompok berikut: 1) Pejabat dan Staf Pemerintah sebanyak 2 orang; 2) NGO yang bergerak di bidang konservasi 4 orang; 3) Ketua dan anggota KTHK Lestari Lawe Desky 10 orang; 4) Ketua dan anggota KTHK Lestari 10 orang; 5) Ketua dan anggota KTHK Lestari Lawe Meruntuh 10 orang; dan 6) Tokoh masyarakat sebanyak 5 orang.

2.2.3. Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan lima indikator utama yang relevan dengan lokasi studi, yaitu peran edukatif dan penyuluhan, peran partisipatif, peran

pengawasan dan pengendalian, peran ekonomi dan sosial, serta peran kelembagaan. Tabulasi kuesioner berfungsi sebagai alat untuk merangkum dan menginterpretasikan hasil wawancara kualitatif secara sistematis. Meskipun pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif, penerapan skoring kategoris memungkinkan peneliti untuk mengukur sejauh mana peran Kelompok Tani Hutan Konservasi (KTHK) dalam berbagai aspek rehabilitasi hutan, seperti penanaman, pemeliharaan, edukasi, dan kerja sama kelembagaan. Tabulasi ini juga memudahkan perbandingan antar responden dan mendukung triangulasi data sehingga meningkatkan validitas hasil penelitian. Selain itu, hasil tabulasi menjadi dasar naratif yang kuat untuk menyimpulkan intensitas dan kualitas partisipasi KTHK. Dengan demikian, tabulasi tersebut menggabungkan pendekatan naratif dan numerik secara seimbang dalam konteks penelitian kualitatif. Herlina dan Hakim (2021) menyatakan bahwa integrasi analisis tematik dan skoring dalam penelitian kualitatif dapat memperkuat argumentasi dan visualisasi data lapangan. Data dianalisis dengan menggabungkan analisis tematik (Braun & Clarke, 2006) dan skoring kategori melalui enam tahap mulai dari familiarisasi data hingga pelaporan. Hasil pengodean dan pengelompokan tema ditampilkan pada Tabel 1, sedangkan nilai interpretasi terhadap jawaban disajikan pada Tabel 2. Untuk memastikan transparansi analisis, kisi-kisi indikator penilaian lima peran KTHK disajikan pada Lampiran 1 dan 2.



Tabel 1. Tabulasi Jawaban Responden

Kategori	Kode	Arti
Tidak Ada Peran	0	Informan menyatakan tidak ada peran dalam aspek tersebut
Lemah	1	Peran ada tapi terbatas, tidak aktif/tidak rutin
Sedang	2	Peran cukup terlihat, namun belum maksimal
Kuat	3	Peran aktif, terstruktur, berkelanjutan

Tabel 2. Nilai Interpretasi KTHK

Rata-rata Skor	Interpretasi Peran KTHK
0.0 – 1.0	Sangat Lemah / Tidak Aktif
1.1 – 2.0	Lemah / Sedang Lemah
2.1 – 2.9	Cukup Kuat
3.0	Sangat Kuat

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Resort Lawe Mamas adalah salah satu resort pengelolaan yang termasuk dalam wilayah kerja Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV Badar, bagian dari Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Kutacane di Balai Besar Taman Nasional

Gunung Leuser. Resort ini memiliki luas 45.598,50 hektar dan terbagi menjadi empat zonasi, yaitu zonasi inti, zonasi rimba, zonasi rehabilitasi, dan zonasi pemanfaatan. Secara administratif, Resort Lawe Mamas terletak di Desa Tanjung Muda, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara. Dari segi topografi, kawasan ini terdiri dari perbukitan berbatu dengan kemiringan hingga 90°, berupa tebing dan batu cadas, yang dilintasi oleh dua sungai, yaitu Sungai Mamas dan Sungai Waih Mirah. Selain itu, Resort Lawe Mamas merupakan pintu masuk untuk *site monitoring* satwa kunci seperti Badak Sumatera serta tiga satwa kunci lainnya, termasuk Harimau Sumatera dan Orangutan Sumatera. Resort ini juga memiliki kemitraan konservasi dengan Kelompok Tani Hutan Konservasi (KTHK), serta program pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat dan kelompok swadaya yang fokus pada mitigasi konflik antara manusia dan satwa liar..

Meskipun sudah diakui sebagai Situs Warisan Dunia, taman nasional ini tetap menghadapi ancaman kerusakan. Bahkan, dalam sidang Komite Warisan Dunia ke-39 di Bonn pada tahun 2011, Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dimasukkan ke dalam daftar Warisan Dunia yang Terancam Bahaya (*List of World Heritage in Danger*). Panut Hadisiswoyo, Direktur Orangutan Information Centre (OIC) sekaligus Juru Bicara Koalisi Penyelamatan TNGL, menyatakan bahwa kerusakan di TNGL masih terus berlangsung baik di wilayah Aceh maupun Sumatera Utara, dengan penyebab utama adalah pembukaan lahan untuk kebun sawit dan jagung.

Gangguan di kawasan Resort Lawe



Mamas kini telah berkurang secara signifikan. Penurunan ini disebabkan oleh pembentukan Kelompok Tani Hutan Konservasi (KTHK), upaya pemberdayaan masyarakat, serta adanya tim pengamanan Lawe Meruntuh yang rutin melakukan patroli harian secara terjadwal. Namun, gangguan dalam skala kecil masih terjadi, seperti pembalakan liar, pembukaan kebun ilegal di zona rehabilitasi dan zona inti, pembakaran lahan dan hutan, perburuan satwa liar, serta penangkapan ikan dengan menggunakan setrum dan racun di sungai. Selain itu, di kawasan Resort Lawe Mamas juga masih ditemukan aktivitas penanaman tanaman ilegal oleh warga, terutama di Desa Kuning Abadi, Kecamatan Darul Hasanah. Tanaman ilegal tersebut berupa kelapa sawit dengan usia tanam yang bervariasi, mulai dari lebih dari 2 tahun hingga lebih dari 15 tahun.



Grafik 1. Skor analisis peran KTHK Lawe Mamas

Berdasarkan Grafik 1, dapat dilihat bahwa penilaian responden terhadap peran Kelompok Tani Hutan Konservasi (KTHK) di Zona Rehabilitasi Resort Lawe Mamas menunjukkan kecenderungan positif di semua indikator. Peran kelembagaan memperoleh skor

rata-rata 2,7 (kategori cukup kuat). KTHK telah memiliki struktur organisasi dan aturan internal, namun efektivitasnya masih perlu diperkuat. Peran edukasi menunjukkan skor tertinggi yaitu 2,9 dengan kegiatan penyuluhan konservasi yang berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat berada pada kategori kuat (2,8). Peran pengawasan memiliki skor 2,3 (sedang), sedangkan peran ekonomi-sosial menunjukkan skor terendah (2,1). Secara keseluruhan, peran edukasi dan partisipasi menjadi kekuatan utama KTHK dalam mendukung keberlanjutan rehabilitasi ekosistem.

Artinya, secara umum kelompok telah memiliki struktur organisasi, aturan, dan mekanisme koordinasi yang berjalan dengan baik. Namun, skor yang belum mendekati 3,00 menunjukkan masih ada ruang untuk meningkatkan efektivitas organisasi, misalnya dengan memperkuat kepemimpinan, memperbanyak rapat rutin, dan meningkatkan transparansi pengambilan keputusan (Normalinda et al., 2021). Peran ini juga menggambarkan sejauh mana kelembagaan KTHK berfungsi sebagai wadah resmi yang mengatur, mengkoordinasikan, dan mengarahkan kegiatan anggotanya. Peran ini mencakup kejelasan struktur organisasi, kepemimpinan, pembagian tugas, serta kemampuan lembaga dalam menjalin kemitraan dengan pihak luar.

Peran edukasi merupakan skor tertinggi di antara semua indikator. Hal ini menunjukkan bahwa KTHK cukup aktif dalam memberikan penyuluhan, sosialisasi, dan edukasi tentang konservasi hutan kepada anggota maupun masyarakat. Meski begitu, masih ada peluang



memperluas cakupan edukasi, seperti pelatihan teknik pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang lebih bervariasi dan inovatif. Artinya, kegiatan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya konservasi, cara pengelolaan hutan yang berkelanjutan, serta penyuluhan teknis seperti penanaman dan pemeliharaan tanaman sudah dilakukan secara intensif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Peran ini menunjukkan sejauh mana KTHK memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pelestarian hutan, teknik rehabilitasi, dan pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan. Peran ini sejalan dengan penelitian Qomar et al (2023) yang menyatakan Penyulu Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) memberikan dorongan dan semangat bagi KTH dalam membentuk KBR dan KBD. Dalam hal ini peran KTHK sejalan dengan peran PKSM dalam memberikan edukasi dan bimbingan kepada masyarakat dan pelajar dalam melestarikan lingkungan dan ikut serta dalam kegiatan konservasi dan rehabilitasi.

Peran partisipatif memiliki Keterlibatan anggota dan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan konservasi tergolong cukup baik. Partisipasi ini penting untuk membangun rasa memiliki terhadap program konservasi. Agar lebih optimal, KTHK bisa menambah frekuensi kegiatan bersama dan memberikan peran yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini menjadi salah satu kunci keberhasilan rehabilitasi kawasan (Huber et al., 2022). Peran ini menggambarkan tingkat keterlibatan aktif anggota dan masyarakat sekitar dalam setiap kegiatan KTHK, baik pada tahap

perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program.

Selain kedua peran di atas, diidentifikasi juga peran KTHK dalam pengawasan dan pengendalian, walaupun peran ini relatif lebih rendah dibanding indikator lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan patroli, pelaporan pelanggaran, dan kerja sama pengawasan dengan pihak pengelola kawasan sudah ada, namun belum maksimal. Faktor keterbatasan sumber daya, jarak, dan sarana patroli bisa menjadi kendala. Perlu peningkatan dukungan logistik dan koordinasi dengan aparat pengelola kawasan konservasi. Meski demikian, angka ini relatif lebih rendah dibanding indikator lain, yang berarti pengawasan masih bisa ditingkatkan, terutama dalam kolaborasi dengan pihak pengelola taman nasional. Ini menunjukkan kemampuan KTHK dalam memantau, mencegah, dan menindak pelanggaran yang terjadi di kawasan, seperti perburuan liar, penebangan ilegal, dan perambahan.

Peran ekonomi dan sosial ini juga memiliki skor terendah bersama dengan pengawasan. Walaupun KTHK sudah mengembangkan usaha berbasis HHBK dan mendukung kesejahteraan anggota, kontribusinya belum optimal. Penguatan usaha produktif, pemasaran hasil, dan diversifikasi produk HHBK menjadi langkah strategis untuk meningkatkan peran ekonomi. Namun, potensi pengembangan usaha ekonomi produktif masih cukup besar untuk ditingkatkan. Peran ini menggambarkan kontribusi KTHK terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan hubungan sosial antaranggota. Peran ini meliputi pengembangan usaha produktif



seperti agroforestry, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Secara keseluruhan, hasil jawaban responden pada grafik 1 mencerminkan bahwa KTHK memiliki peran yang cukup kuat dalam mendukung rehabilitasi dan pengelolaan hutan di Resort Lawe Mamas, dengan pencapaian tertinggi pada aspek edukasi dan penyuluhan. Ke depan, peningkatan pada aspek pengawasan serta penguatan manfaat ekonomi dapat semakin memperkuat peran KTHK di masyarakat.

Peran ekonomi dan sosial KTHK menunjukkan nilai terendah dibandingkan indikator lainnya, dengan skor rata-rata 2,1. Kondisi ini menggambarkan bahwa kontribusi KTHK terhadap peningkatan kesejahteraan anggota maupun penguatan ekonomi lokal masih terbatas. Salah satu penyebab utama lemahnya peran ekonomi adalah minimnya akses terhadap pasar hasil hutan bukan kayu (HHBK), seperti madu, bambu, dan rotan, yang menjadi komoditas utama masyarakat. Keterbatasan jaringan pemasaran dan dukungan modal usaha menyebabkan nilai tambah ekonomi dari aktivitas konservasi belum dirasakan secara optimal oleh anggota kelompok. Hal ini sejalan dengan temuan Normalinda et al. (2021) yang menekankan bahwa keberhasilan program rehabilitasi hutan sangat bergantung pada adanya insentif ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat pelaku konservasi.

Selain itu, sebagian besar kegiatan ekonomi KTHK masih bersifat subsisten dan tidak terintegrasi dengan rantai nilai komersial. Menurut Daulay et al. (2023), keberlanjutan partisipasi masyarakat dalam program

konservasi akan menurun apabila tidak diikuti oleh manfaat ekonomi yang nyata. Situasi serupa juga ditemukan di kawasan konservasi lain, di mana masyarakat lebih termotivasi berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi ketika program tersebut mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga dan memberikan alternatif mata pencaharian di luar aktivitas perambahan.

Dari perspektif teori pemberdayaan masyarakat, lemahnya peran ekonomi ini juga dapat dijelaskan melalui konsep kapasitas adaptif komunitas (community adaptive capacity), di mana keberhasilan ekonomi lokal bergantung pada kemampuan kelembagaan untuk membangun jejaring, mengakses informasi pasar, serta mengelola sumber daya secara kolektif (Müller & Fourie, 2011). Dalam konteks KTHK Lawe Mamas, kapasitas ini masih terbatas karena peran kelembagaan lebih terfokus pada pengamanan kawasan dan edukasi konservasi, bukan pada pengembangan usaha berbasis hutan lestari.

Selain hambatan struktural, terdapat pula faktor sosial-kultural, yaitu rendahnya literasi kewirausahaan dan inovasi produk di tingkat anggota. Sebagaimana dikemukakan oleh Surbakti (2023), sebagian besar anggota KTHK masih memandang kegiatan konservasi sebagai kewajiban moral, bukan peluang ekonomi. Pandangan ini menyebabkan aktivitas ekonomi kelompok belum berkembang menjadi unit usaha kolektif yang berorientasi pasar.

Untuk memperkuat peran ekonomi di masa depan, penting bagi pengelola TNGL dan pemerintah daerah untuk menerapkan pendekatan konservasi berbasis ekonomi inklusif



(inclusive conservation economy), yang mengintegrasikan pelatihan kewirausahaan, akses permodalan mikro, serta kemitraan dengan sektor swasta. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Gómez-Ruiz et al. (2022) bahwa keberhasilan restorasi ekosistem tidak hanya diukur dari aspek ekologis, tetapi juga dari peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal sebagai bagian dari sistem sosial-ekologis yang saling bergantung.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Kelompok Tani Hutan Konservasi (KTHK) di Zona Rehabilitasi Resort Lawe Mamas berperan penting dalam mendukung keberhasilan rehabilitasi ekosistem TNGL. Peran edukasi dan penyuluhan menjadi aspek paling menonjol, diikuti oleh partisipasi dan kelembagaan yang relatif kuat, sedangkan aspek ekonomi dan pengawasan masih memerlukan penguatan. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya penguatan kapasitas kelembagaan KTHK, pengembangan ekonomi produktif berbasis hasil hutan bukan kayu, dan peningkatan dukungan teknis dalam kegiatan pengawasan lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adela, F. P., & Saragih, A. (2017). Corruption, Deforestation And Disaster In The Taman Nasional Gunung Leuser Forest. In *2nd international conference on social and political development (ICOSOP 2017)* (pp. 633-639). Atlantis Press.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative research in psychology*, 3(2), 77-101.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Edisi ke-4). SAGE Publications.
- Daulay, R., Anhar, A., & Pohan, A. (2023). Tingkat Partisipasi Kelompok Tani Hutan Konservasi Terhadap Program Kemitraan Konservasi di Desa Marpunge Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 8(4), 1390-1404. doi:<https://doi.org/10.17969/jimfp.v8i4.27969>.
- Gómez-Ruiz, P. A., Betancourth-Buitrago, R. A., Arteaga-Cote, M., Carbajal-Borges, J. P., Teutli-Hernández, C., & Laffon-Leal, S. (2022). Fostering a participatory process for ecological restoration of mangroves in Pantanos de Centla Biosphere Reserve (Tabasco, Mexico). *Ecosystems and People*, 18(1), 112-118.
- Herlina, N., & Hakim, A. (2021). *Integrasi Analisis Tematik dan Skoring dalam Penelitian Kualitatif Lapangan*. *Jurnal Penelitian Sosial dan Humaniora*, 6(2), 145-156.
- Huber, J. M., Newig, J., & Loos, J. (2023). Participation in protected area governance: A systematic case survey of the evidence on ecological and social outcomes. *Journal of Environmental Management*, 336, 117593.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2024). *Marak Pembangunan, Begini Cara Pemerintah Kendalikan Deforestasi*. Jakarta: KLHK. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d->



- [7400637/marak-pembangunan-begini-cara-pemerintah-kendalikan-deforestasi](#)
- Kuswanda, W., & Barus, S. P. (2017). Diversity and determination of wildlife 'umbrella species' in the Gunung Leuser National Park. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*, 6(2), 113-123.
- Mongabay. (2019). Peta Ungkap Tutupan Hutan TN Gunung Leuser di Aceh Terus Berkurang. Diakses [8-8-2025] melalui: <https://mongabay.co.id/2019/03/12/peta-ungkap-tutupan-hutan-di-tn-gunung-leuser-di-aceh-terus-berkurang/>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi ke-2). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Müller, K., & Fourie, A. (2011). Innovations for Biodiversity Conservation: The Case of the Conservation Stewardship Programme, Western Cape, South Africa. *Stellenbosch University, School of Public Management & Planning, Stellenbosch*.
- Noormalinda, N., Peran, S. B., & Rudy, G. S. (2021). Persepsi Masyarakat Desa Hamak Timur Terhadap Rencana Kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Di Kawasan Hutan Lindung Gunung Mantiut Kabupaten Hulu Sungai Selatan. *Jurnal Sylva Scientiae*, 4(4), 637-645.
- Qomar, N., Mardianti, G., & Oktorini, Y. (2023). Peran Para Pihak dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. *Jurnal Ilmu-Ilmu Kehutanan*, 9(1), 12–19.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (ed. XX). Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, A., & Ariantiningih, F. (2013). Dari Penebang Hutan Liar ke Konservasi Leuser.
- Surbakti, S. Y. (2023). *Kinerja Kelompok Tani Hutan Konservasi (KTHK) dalam Rehabilitasi Hutan Taman Nasional Gunung Leuser di Resort Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- WRI. (2019). Indonesia Is Reducing Deforestation, but Problem Areas Remain. Diakses [8-8-2025] melalui: https://wri-indonesia.org/en/insights/indonesia-reducing-deforestation-problem-areas-remain?utm_source